

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TEBAS KUALA KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Oleh :

TARI SERA ^{1*}

NIM. E1012161086

Dr. Rusdiono, M.Si², Deni Darmawan, SE, M.Si²

*Email: tari2230@student.ac.id

1. Mahasiswa Prograam Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tebas Kuala. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksanaan program BUMDes di desa Tebas Kuala belum sesuai dalam Peraturan Peraturan Desa Tebas Kuala Nomor 4 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Rondinelli dan Cheema (dalam Subarsono 2010, 101) yang terdiri dari : 1) Kondisi Lingkungan. Kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang ada di desa Tebas Kuala karena unit yang dipilih tidak sesuai yang dibutuhkan masyarakat; 2). hubungan antar organisasi. Hubungan yang terjalin antar pelaksana BUMDes kurang efektif, dapat dilihat dari hanya beberapa pelaksana yang dapat hadir dalam musyawarah untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program BUMDes; 3). Sumberdaya Organisasi. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 4). Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Kurangnya pelatihan yang diikuti pelaksana pengelola BUMDes. Tidak transparan kepada masyarakat Desa Tebas Kuala mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah masyarakat ikut serta dalam program BUMDes, menjalin hubungan baik antar pelaksana, konsisten dalam menjalankan unit usaha yang ada dan pelaksana operasional mengikuti pelatihan untuk mewujudkan berhasilnya program BUMDes di Desa Tebas Kuala.

Kata kunci : Implementasi, Hasil Program BUMDes.

IMPLEMENTATION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE PROGRAM IN TEBAS KUALA VILLAGE, TEBAS SUB-DISTRICT, SAMBAS REGENCY

By:

TARI SERA ^{1*}

NIM. E1012161086

Dr. Rusdiono, M.Si², Deni Darmawan, SE, M.Si²

*Email: tari2230@student.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak

ABSTRACT

This research aimed to analyze the results of implementing Village-Owned Enterprise program managed by Tebas Kuala Village Government. The problem in this research was that the implementation of Village-Owned Enterprise program had not provided optimal results because the implementation of Village-Owned Enterprise program in Tebas Kuala village was not in accordance with Tebas Kuala Village Regulation Number 4 of 2017. The research method used was qualitative research method, with descriptive research design. This research used the theory of Rondinelli and Cheema (in Subarsono 2010, 101) consisting of: 1) Environmental condition. The lack of support and participation from the community in Tebas Kuala village was due to unsuitable unit to the community's needs; 2). Relationship between organizations. The relationship existing between the implementers of Village-Owned Enterprise was ineffective which was observed from a few implementers who attended the deliberations to discuss problems occurring in the implementation of Village-Owned Enterprise program; 3). Organizational Resources. The available human resources could not take advantage of business opportunities optimally and too many units had been selected so that the available funds were insufficient; 4). Characteristics and capabilities of implementing agencies. There was a lack of training attended by Village-Owned Enterprise managers and they were not transparent to the community of Tebas Kuala Village regarding the programs being implemented and financial reports. It is suggested by the researcher that the community should participate in Village-Owned Enterprise program, maintain good relations between the implementers, be consistent in running existing business units and the operational implementers should attend training to realize the success of Village-Owned Enterprise program in Tebas Kuala Village.

Keywords: Implementation, Village-Owned Enterprise Program Results.



ISI JURNAL MENCAKUP :

A. PENDAHULUAN.....	4
1. Latar belakang penelitian	4
2. Identifikasi masalah penelitian	6
3. Fokus penelitian.....	6
4. Rumusan masalah penelitian	6
5. Tujuan penelitian	6
6. Manfaat penelitian	6
B. TINJAUAN PUSTAKA	7
C. METODE PENELITIAN.....	11
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
1. Kondisi Lingkungan.....	12
2. Hubungan Antar Organisasi	13
3. Sumberdaya Organisasi.....	15
4. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana	15
E. PENUTUP.....	16
1. Kesimpulan.....	16
2. Saran.....	17
F. DAFTAR PUSTAKA	18

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang tertinggal dan rendah dibanding kelurahan, maka pemerintah pusat ingin mengubah *mindset* ini dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Salah satu strategi pemerintah untuk memudahkan desa dalam mengelola potensi yang ada yaitu dengan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan

Usaha Milik Desa sebagai pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan BUMDes dalam menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan kerjasama antar desa. BUMDes dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable.

Peraturan Desa Tebas Kuala nomor 4 tahun 2017 tentang pendirian BUMDes Tebas Kuala, dalam Pasal 2 BUMDes diberi nama BUMDes Kuala Berkah. Lima unit usaha yang di bentuk BUMDes Kuala Berkah adalah unit galangan perahu, unit saprodi, unit jasa pembayaran listrik unit penyewaan Unit wifi dan ATK yang pelaksanaannya terdiri dari penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, dan lima kepala unit.

Keputusan Kepala Desa Tebas Kuala Nomor 56 tahun 2017 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Tebas Kuala Kecamatan Tebas Modal awal Program BUMDes tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berjumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 tidak ada penambahan modal.

Pendapatan pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp.54.178.127 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) sedangkan pengeluaran selama dua tahun yaitu Rp.74.991.549,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) memperlihatkan bahwa BUMDes pada tahun pertama Kuala Berkah mengalami *defisit* sebesar Rp.19.164.566,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan tahun 2019 mendapatkan defisit sebesar Rp.1.568.866,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Penghasilan BUMDes masih jauh dari kata mensejahterakan masyarakat desa, karena beberapa unit belum memberikan keuntungan.

kondisi lingkungan yang ada di Desa Tebas masih kurang mendukung dalam program BUMDes. Desa Tebas kuala mempunyai wilayah strategis terletak di Kecamatan yang menjadikan wilayah Desa Tebas Kuala menjadi pusat perekonomian. Unit yang dipilih sudah sesuai dengan potensi desa tersebut, seperti unit galangan perahu, dan unit saprodi, sedangkan unit wifi dan ATK, unit penyewaan, dan unit pembayaran

belum mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat .

Hubungan antar pelaksana BUMDes belum maksimal Kegiatan perencanaan, pelaksana, dan evaluasi dalam program BUMDes sudah dilakukan dengan baik, tetapi dalam komunikasi masih kurang, pada saat diadakan musyawarah tidak semuanya dapat hadir.

Sumberdaya manusia yang ada di BUMDes secara kuantitas sudah mencukupi walaupun tidak ada staff untuk membantu kepala unit supaya bisa bergantian mengelola unitnya, implementor masih minim dalam mengelola BUMDes dan menggunakan komputer. Unit-unit yang dipilih terlalu banyak, dana yang tersedia yaitu 150 juta harus dibagi ke lima unit, pengelolaan dana menjadi tidak teratur dan pelaksanaannya menjadi tidak fokus sehingga unit sulit untuk menuju pasar yang luas.

Kemampuan pelaksana operasional mengelola program BUMDes, Pelaksana yang ditunjukan oleh BUMDes harus memiliki syarat berkelakuan baik, memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat. Kemampuan pelaksana operasional masih belum optimal sesuai yang sudah ditetapkan dalam Anggaran

Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa Kuala Berkah.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka identifikasi masalah implementasi program BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan yang ada di Desa Tebas Kuala kurang mendukung program BUMDes
2. Hubungan antar pelaksana BUMDes belum maksimal
3. Unit yang dipilih implementor peluang usaha rendah dan terlalu banyak sehingga dana yang tersedia kurang mencukupi
4. Kurangnya kemampuan pelaksana operasional mengelola program BUMDes

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan pada “Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi program BUMDes di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka peneliti merumuskan “Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hasil implementasi program BUMDes di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas” ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi program BUMDes di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Sebagai media aplikasi teori yang berguna dalam pengembangan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu khususnya implementasi program / kebijakan pemerintah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan tentang masalah implementasi program BUMDes di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Manfaat yang didapat oleh BUMDes Kuala berkah, hasil penelitian ini

diharapkan mampu menghasilkan temuan untuk pengembangan BUMDes, sesuai dengan Peraturan Desa Tebas Kuala no 4 Tahun 2017 tentang pendirian BUMDes Tebas Kuala.

Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dalam ikut berpartisipasi sehingga BUMDes bisa terus berkembang dan maju dalam mensejahterakan Desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kebijakan Publik

Carl I. Friedrich (Nugroho 2014,26) mengatakan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Thomas Dye (Anggara 2014,35) mendefinisikan :“kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di kerjakan atau tidak di kerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus di lakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, dan di sinilah pemerintah harus

bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan”

Menurut James E.Anderson (Subarsono 2010,2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang di tetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Definisi Anderson bahwa kebijakan publik bisa dibuat oleh badan-badan pemerintahan dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, sosial budaya, keamanan, pertahanan dan lain sebagainya.

Menurut Bridgeman dan Davis (Anggara 2014) kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, Yakni Sebagai tujuan (*objective*) sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothetisi*).

James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut :

1. Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural,
2. Kebijakan distributif dan kebijakan regulasi versus

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik,
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods)

Tahap tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1995) sebagaimana dikutip Sahya Anggara (2014, 120-121) adalah penyusunan agenda proses yang strategis dalam realitas kebijakan publik, formulasi kebijakan, adopsi / legitimasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, penilaian / evaluasi kebijakan

Berdasarkan pengertian kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan mengenai keputusan dari pemerintah, badan lembaga atau negara dalam memecahkan masalah publik melalui tindakan dengan berbagai konsekuensinya dan mendapatkan manfaat yang besar tidak menimbulkan kerugian, termasuk untuk tidak melakukan apapun.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Udoji (Wahab, 2012:126) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan sekedar berupa impian bagus yang

tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Edward III (Anggara 2014,249) implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan (*output,outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain lain. Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi 2016, 57) mendefinisikan : Implementasi kebijakan publik sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Menurut Goggin et.al (Anggara 2014, 262) proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel :

1. dorongan dan paksaan di tingkat federal
2. kapasitas pusat/negara
3. dorongan dan paksaan di tingkat pusat dan daerah.

Tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan

kebijakan yang memiliki logika *bottom up*, Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro oleh Wibawa (Mulyadi 2016, 47)

Menurut Zainal Abidin (Mulyadi 2016, 5) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

1. pendekatan struktural.
2. Pendekatan prosedural/manajerial
3. Pendekatan kewajiban/ behavior

Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi kebijakan merupakan tahapan atau tindakan dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh implementor atau badan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Teori George Edward III (Winarno 2010, 92) implementasi kebijakan Dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

- 1) Komunikasi yaitu, Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.
- 2) Sumber-sumber, yaitu Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas,

- 3) Disposisi, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
- 4) Stuktur Birokrasi.

Teori donald S.Van Meter dan Carl E. Van horn (Agustino, 2016, 133) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni.

- 1 Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2 Sumber daya, implementasi perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun non-manusia,
- 3 Karakteristik agen pelaksana,
- 4 Sikap arau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana,
- 5 Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6 Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik,

Teori David L. Weimer dan Aidan R.Vining (Subarsono 2010, 103) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Suatu program yakni,

1. Logika kebijakan, kebijakan yang masuk akal (*reasonable*) dan pendapat dukungan teoretis. Logika dari suatu kebijakan.
2. Lingkungan tempat kebijakan di operasikan, lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis.

3. Kemampuan implementor kebijakan.

Menurut Rondinelli dan Cheema (Subarsono 2010, 101) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implmentasi, yakni

1) Kondisi Lingkungan (*enviromental contitions*)

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial cultural serta keterlibatan penerima program.

2) Hubungan Antar Organisasi (*inter-organizational relationship*)

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

3) Sumberdaya Organisasi (*organizational resources*)

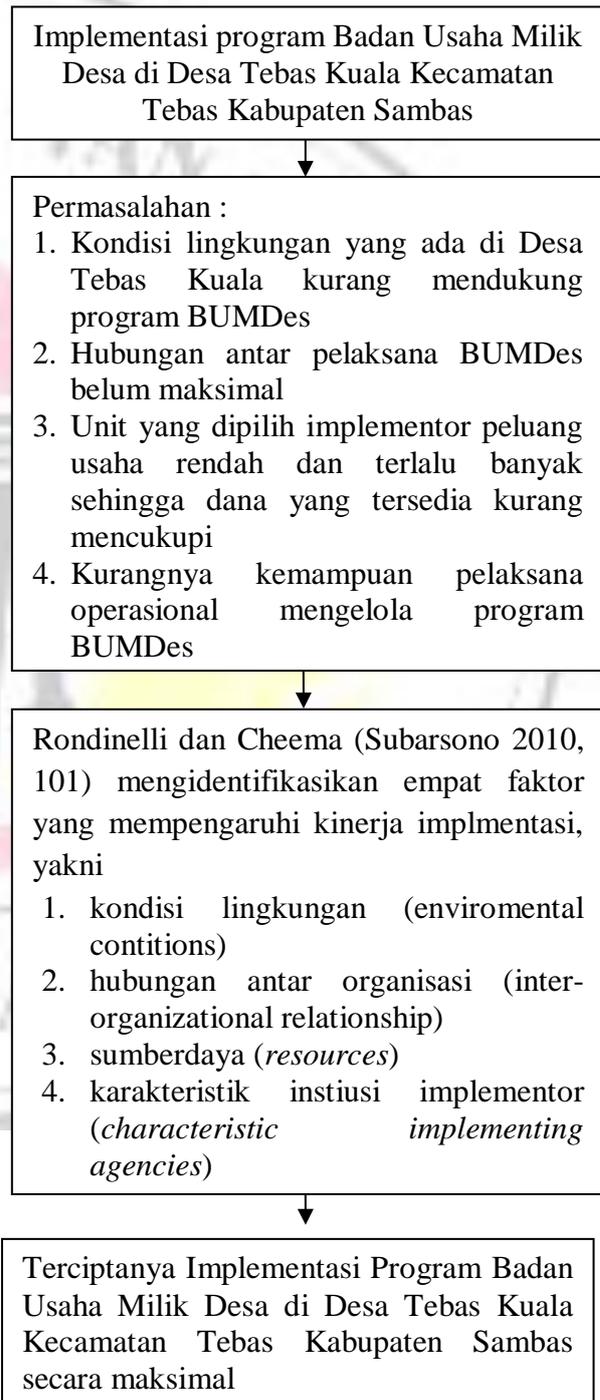
Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik. Sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*)

4) Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana (*the characteristic and capabilities of the implementing agency*). mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan

yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat bagan alur pikir penelitian sebagai berikut.

Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menurut Moleong (2016:11) bahwa penelitian deskriptif adalah data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. menurut Moleong (2016:6) bahwa pendekatan kualitatif adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penelitian ini adalah :

1. melakukan Orientasi Lapangan, mengumpulkan fenomena, data dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Membuat Outline atau Kerangka Penelitian, seperti tema atau judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian atau ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

3. Penyusunan Proposal Penelitian, Dosen pembimbing memberikan pengarahan atau menulis usulan Penelitian (konsultasi).
4. Diskusi/Seminar Proposal Penelitian, Materi yang disajikan yaitu yang rumusan masalah, pertanyaan penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data. instrumen penelitian, serta analisis data.
5. Membuat Draf Laporan Penelitian, peneliti menyusun hasil temuannya dilampirkan kedalam draf penelitian yang berfungsi sebagai dasar penulisan skripsi.
6. Diskusi/Konsultasi Draf Laporan Penelitian, didiskusikan dengan dosen pembimbing seperti gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran guna menyempurnakan skripsi sehingga siap untuk disidangkan.
7. Ujian Skripsi, dijalani oleh mahasiswa apabila skripsi yang diajukan telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengelola.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas

Subjek penelitian penulis adalah Kepala Desa Tebas Kuala, Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, Kepala unit BUMDes, masyarakat

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan BUMDes di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dengan alat Pedoman Observasi, Panduan wawancara, serta Dokumen. Sedangkan teknik keabsahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan verifikasi).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang berkaitan dengan stuktur pembuat program BUMDes memilih program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Tebas kuala. Pendirian BUMDes harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya alam

dan sumberdaya manusia yang ada di desa, serta menggali potensi yang ada desa untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengambil peluang usaha.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pemilihan unit usaha BUMDes tidak semuanya diperlukan oleh masyarakat Desa. Galangan perahu dan saprodi sudah sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat desa dan Tiga unit yang dipilih seperti, unit jasa pembayaran, penyewaan, unit wifi dan ATK perlu ditingkatkan lagi agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

Kondisi lingkungan berkaitan dengan dukungan dari masyarakat Desa, stuktur organisasi bumdes dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan program BUMDes. Lingkungan kondusif bisa tercipta jika adanya dukungan yang baik dalam lingkungan. Stuktur organisasi BUMDes dan pemerintahan masih belum maksimal untuk ikut serta membangun program BUMDes karena masyarakat hanya sedikit saja yang menggunakan pelayanan yang disediakan dari BUMDes

kondisi lingkungan di lingkungan masyarakat, perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk membangun BUMDes. agar masyarakat paham pentingnya membangun BUMDes,

Ketidaktahuan masyarakat atas informasi penting menjadikan program hanya diisi atau diikuti oleh orang itu-itu saja, atau istilahnya lingkaran keluarga. Pihak BUMDes belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seharusnya kegiatan BUMDes harus bersifat transparan tentang keberadaan BUMDes, fungsi BUMDes, jumlah aset, penghasilan, program kerja, dan sebagainya. Warga Desa Tebas Kuala masih belum mengetahui dikarenakan tidak ada keterbukaan informasi yang masih menjadi kendala yang banyak dijumpai di desa-desa.

Fasilitas yang tersedia menunjang keberhasilan BUMDes, tanpa peralatan yang cukup dan memadai dapat mengurangi efektivitas dan efisien dalam melaksanakan kebijakan. Fasilitas yang dimiliki adalah laptop 1 unit, printer 1 unit, meja dan kursi ATK 5 unit, lemari kaca 2 unit, perahu dua unit, tenda 4 unit dan kursi untuk disewakan 15 unit. Fasilitas BUMDes masih sangat minim untuk mendukung implementasi kebijakan program BUMDes di Desa Tebas Kuala. Untuk kesuksesan roda usaha juga diperlukan lokasi yang tepat, lokasi usaha yang strategis akan sangat mempengaruhi produk atau jasa yang akan di tawarkan.

2. Hubungan Antar Organisasi

Kebijakan program BUMDes merupakan kebijakan dari pemerintah setempat, pihak dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi sangat diperlukan agar pelaksanaan program BUMDes dapat berjalan, tercapainya kejelasan dan konsistensi, tidak tumpang tindih tugas dari masing-masing sehingga pelaksana operasional harus sudah paham mengenai tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait dan melaksanakannya dengan baik seperti yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Tebas Kuala Nomor 56 Tahun 2017 Tentang AD/ART BUMDes Tebas Kuala yang menjelaskan tugas dari pelaksana operasional yaitu, 1). Melaksanakan pengelolaan BUMDes, 2) memanfaatkan potensi desa, 3). Kerjasama dengan lembaga lainnya. 4). Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDes, 5) menyampaikan laporan kepada kepala desa, 6). menyampaikan perkembangan usaha kepada masyarakat dan forum musyawarah desa, 7). Melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian lainnya.

Hubungan antar organisasi terkait standarisasi perencanaan pelaksana, dan evaluasi dalam program BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Kepala

Desa Tebas Kuala Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Tebas Kuala. (1). Perencanaan BUMDes dapat dilihat dari adanya SK dan AD ART BUMDes Kuala berkah. BUMDes seharusnya menggunakan perencanaan era baru, yaitu merencanakan produk atas kebutuhan masyarakat dan menganalisis harapan masyarakat terlebih dahulu, memilih usaha yang belum ada di Desa tersebut, dan tidak menghancurkan usaha oranglain. (2) implementasi, dalam pelaksanaan utama, kegiatan BUMDes adalah bisnis dengan tujuan sosial, keuntungan untuk masyarakat (Buisness Sociel) guna minimnya pendanaan yang tersedia. (3) evaluasi, hasil kegiatan BUMDes Kuala berkah merupakan bentuk dari kegiatan BUMDes Kuala berkah, berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya.

Hubungan antar pelaksana operasional BUMDes harus mempunyai berhubungan yang baik, seperti yang sudah ditetapkan peraturan Keputusan Kepala Desa Tebas Kuala Nomor 56 Tahun 2017 dalam bab vii yaitu musyawarah yang diselenggarakan yaitu musyawarah desa, musyawarah desa luar biasa, musyawarah tahunan, musyawarah

pengurus, musyawarah pelaksana operasional,

musyawarah tahunan sudah dilaksanakan, musyawarah pelaksana operasional juga sudah dilaksanakan, tetapi hanya beberapa pengelola saja yang dapat hadir, pentingnya mengikuti musyawarah adalah untuk membahas apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan, jika terjadi masalah, untuk mencari solusi kemajuan BUMDes, karena musyawarah tidak sering dilakukan hubungan antar pelaksana menjadi tidak efisien kurangnya komunikasi untuk membahas perkembangan program BUMDes.

Hubungan antar pelaksana terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang merupakan tugas Badan Pengawas sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu pada pasal 16 Keputusan Kepala Desa Tebas Kuala Nomor 57 Tahun 2017 yang isinya pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun. Keputusan dari kepala Desa ini sudah dilakukan dengan baik oleh Badan Pengawas dengan menyelenggarakan musyawarah untuk membahas kinerja pelaksana operasional yang dilaksanakan satu tahun sekali.

3. Sumberdaya Organisasi

Proses pelaksanaan program BUMDes di Desa Tebas Kuala sumber manusia yang paling berperan dalam pelaksanaan operasional BUMDes. Pelaksana operasional BUMDes dipilih diluar staff desa, dimana orangnya murni masyarakat biasa. Pengurus BUMDes hanya ada pengurus inti saja, tidak ada staff pembantu disetiap unit usaha dan ini membuat para kepala unit usaha sedikit kerepotan dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan program BUMDes di Desa Tebas Kuala masih belum memadai, orang orang yang menangani BUMDes adalah sebagian yang belum melek teknologi sehingga menghambat jalannya program BUMDes

Sumberdaya organisasi terkait finansial untuk pelaksanaan program BUMDes modal yang diterima BUMDes dari anggaran APBDDes sekitar 150 juta yang harus dikelola. Dana yang tersedia harus dibagi ke lima unit sehingga usaha yang dibangun kekurangan modal, fasilitas masih kurang sulit untuk mencapai pasar yang luas.

4. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana

Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta

cocok dengan para agen pelaksana. Untuk mewujudkan BUMDes pengelola harus mempunyai kemampuan dalam mengelola program BUMDes

Karakteristik dan kemampuan agen Pelaksanaan BUMDes di Desa Tebas Kuala terkait peran pembina sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hambatannya adalah mindset dari individual pengelola itu sendiri. Kurangnya pelatihan yang diikuti oleh pengelola BUMDes, hingga kemampuan pengelola kurang maksimal. Pihak pemerintah Desa dan BUMDes tidak transparan kepada masyarakat Desa Tebas Kuala tentang program yang dijalankan BUMDes harus memiliki tujuan keuntungan guna terlaksananya kemandirian ekonomi.

Memang tidak mudah bagi desa untuk mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha, dari pengelola BUMDes di Desa Tebas kuala BUMDes hanya sebatas pekerjaan sampingan saja, akibatnya BUMDes tidak melaju hanya jalan di tempat.

Karakteristik dan kapabilitas pelaksana terkait dalam karakter seorang pemimpin dalam upaya mengkoordinasi, mengontrol, dan dalam mengambil keputusan dengan baik. Peran kepala desa

yaitu sebagai penasehat yang memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala

Karakteristik pelaksana juga dinilai dari hubungan antara instansi atau pelaksana dengan kelompok sasaran. Kelompok sasaran disini adalah masyarakat Desa Tebas Kuala. Keberhasilan dari setiap kebijakan harus didukung oleh para pengurus BUMDes dan sasaran program yang pastinya. Karena partisipasi masyarakatlah yang bisa memajukan program ini. program yang dijalankan dan transparansi keadaan keuangan BUMDes. kepada masyarakat Desa termasuk kaum muda yang ada di Desa, keberadaan BUMDes tidak mengajak generasi muda untuk mengelola BUMDes. Agar generasi muda menjadi kreatif untuk ikut mewujudkan berhasilnya BUMDes.

Hubungan antara instansi atau pelaksana BUMDes dengan kelompok sasaran belum tersosialisasi kan dengan baik, partisipatif yang masih rendah dan tidak transparansi. Hanya unit unit tertentu

yang dapat dirasakan oleh masyarakat, selebihnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tebas Kuala belum optimal. Hal ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan

Unit yang dibentuk oleh stuktur organisasi tidak semuanya diperlukan oleh masyarakat Desa dan sesuai dengan potensi lingkungan Desa Tebas Kuala, seperti unit wifi dan ATK, unit jasa pembayaran dan unit penyewaan. Sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan dengan maksimal, sehingga masih kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Fasilitas untuk menunjang keberhasilan BUMDes yang minim menyebabkan BUMDes kuala berkah kekurangan fasilitas yang diperlukan.

2. Hubungan Antar Organisasi

Kejelasan dan pembagian tugas sudah ditetapkan dalam peraturan.

pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan, namun pengawasannya masih kurang. Kegiatan perencanaan, pelaksana, dan evaluasi dalam program BUMDes sudah dilakukan dengan baik, tetapi dalam komunikasi masih kurang, karena aktivitas pelaksana berbeda-beda, sehingga pada saat diadakan musyawarah tidak semuanya dapat hadir. Komunikasi dilakukan tidak pasti kapan dilakukan dalam satu waktu, hanya pada saat dibutuhkan saja sehingga kegiatan BUMDes bisa dibilang belum berhasil meningkatkan pendapatan asli Desa.

3. Sumberdaya Organisasi

Sumberdaya organisasi dari sumber daya manusia masih kurang dalam mengelola unit usahanya karena yang menanganai BUMDes adalah sebagian yang belum melek teknologi dan pelaksana operasional memiliki pekerjaan utama sehingga pada waktu-waktu tertentu mereka keteteran dalam mengelola program kerjanya. Sedangkan dalam sumberdaya finansialnya tidak memenuhi pelaksanaan program BUMDes, dana harus dibagi ke lima unit, usaha yang dibangun hanya berjalan ditempat tidak bisa mencapai pasar yang luas.

4. Karakteristik Dan Kapabilitas Instansi Pelaksana

Pelaksanaan BUMDes di Desa Tebas Kuala peran pembina sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hambatannya adalah mindset dari individual pengelola itu sendiri. Kurangnya pelatihan yang diikuti oleh pengelola BUMDes, sehingga kemampuan pengelola kurang maksimal. Pihak pemerintah Desa dan BUMDes tidak transparan kepada masyarakat Desa Tebas Kuala tentang program yang dijalankan dan laporan keuangan BUMDes.

1.2 Saran

Saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan program BUMDes di Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Pimpinan harus lebih memperhatikan kondisi seluruh pengelola. Pihak pemerintah Desa dan masyarakat harus mendukung dan memahami program yang dijalankan oleh BUMDes dan menyediakan fasilitas yang bisa menunjang keberhasilan BUMDes.
2. Pembinaan dan pengawasan lebih ditingkatkan. Memperkuat pola komunikasi antara pengelola dengan melakukan pertemuan rutin bulanan

untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh semua pihak yang ada di Desa Tebas Kuala. Selalu diterapkan musyawarah desa yang sudah dicantumkan dalam peraturan desa.

3. Pengelola BUMDes harus lebih efektif dan konsisten dalam menjalankan unit-unit usaha dari BUMDes dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, agar terjadinya peningkatan penghasilan.
4. Peningkatan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang baik. Sehingga usaha yang dikerjakan lebih maju dan laporan tersimpan rapi dalam dokumen penting BUMDes untuk mempermudah data yang dibutuhkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, dan melakukan sosialisasi lebih intensif lagi agar masyarakat desa bisa mengetahui perkembangan program BUMDes yang dilaksanakan sehingga tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Wahab, S.2012, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-model Implementasi

Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Agus P.,Erwan dan Ahadiyahati, Metia. 2015. Modul Pelatihan Analisis Kebijakan (Metodologi Riset Kebijakan). Jakarta: t,p.

Agustino, Leo,2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik:CV.Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Arikunto, S, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara

Tahir, Arifin,2014, kKebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Moleong,L,J,2016. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Kary

Mulyadi, deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. bandung: CV Alfabeta

Nugroho, Riant, 2014, Publik Policy, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Purwanto, Erwan Agus,. Dan Sulistyastuti Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Santosa, Pandji. 2018. *Administrasi Publik*. Bandung: PT Rfika Aditama

Subarsono,A. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sugiyono,2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Suharno, 2010. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Usman, Akbar. 2009. *Metode penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

Alfarisi, Salman, Sujianto, dan Meyzi Heriyanto,2017 “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” Diambil pada tanggal 16 September 2019 pukul 15.14 WIB dari <http://onesearch.id/Record/10S1137.article-4770/Details>

Wahyudin Sumpeno, 2011, *Perencanaan Desa Terpadu*, Bandung: Fokus Media

Winarno, Budi, 2010, *Kebijakan Publik (teori dan proses)*, Jakarta: Media Pressindo.

Skripsi

Y.Fajarwati, 2016 “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang”. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Peraturan perundang-undangan

Keputusan Kepala Desa Tebas Kuala Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Organisasi Pengelolaan BUMDes

Peraturan Desa Tebas Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian BUMDes Tebas Kuala

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang